

**PEMANFAATAN LAPORAN POSISI KEUANGAN OLEH
PENGGUNA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan di Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

FITRI RISALAWATI

NIM. 12030110120094

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fitri Risalawati
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120094
Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN LAPORAN POSISI
KEUANGAN OLEH PENGGUNA DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan
di Jawa Tengah)**
Dosen Pembimbing : Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.

Semarang, 3 Maret 2014

Dosen pembimbing

(Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt)

NIP. 19650520 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Fitri Risalawati
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120094
Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN LAPORAN POSISI
KEUANGAN BAGI PENGGUNA
DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
(Studi Empiris pada Instansi
Pemerintahan di Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Maret 2014

Tim Penguji

1. Drs. H. Sudarno M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Anis Chariri, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Drs. H. M. Didik Ardiyanto, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang beranda tangan dibawah ini saya, Fitri Risalawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PEMANFAATAN LAPORAN POSISI KEUANGAN OLEH PIMPINAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan di Jawa Tengah)”, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan caramenyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tridak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila dikemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 Maret 2014
Yang membuat pernyataan,

(Fitri Risalawati)
NIM: 12030110120094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S.

94:1-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk

kedua orang tua tercinta, adik-adik tersayang,

dan sahabat tersayang.

Terima kasih atas doa dan

kasih sayang yang tulus kepada saya.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of education, experience, and social factor of the Statement of Financial Position utilization information for the users, especially the executive, legislative, and examiner on government agencies in Central Java in the planning decision-making, control and management. User quality statement of financial position can affect the understanding of planning decisions, control, and management.

The study population consisted of leaders, supervisors, and inspectors as users of financial statement information in decision-making positions. This research was conducted convinion sampling with reference to the scope of research in the Central Java government agencies. Data were obtained from questionnaires submitted directly by the researcher. Regression model was used to analyze the factors of education, experience, and social factors in the use of financial statement information to decision-making positions.

The results showed that the variables of education, experience, and social factor and significant positive effect on the use of the information on the statement of financial position of government agencies in Central Java.

Key words: Attitude and Behavior theory, Statement of Financial Position, Government Agencies, Education, Experience, Social Factor, Decision-Making

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial terhadap pemanfaatan informasi Laporan Posisi Keuangan bagi para pengguna, khususnya eksekutif, legislatif, dan pemeriksa pada instansi pemerintahan di Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan. Kualitas pengguna laporan posisi keuangan dapat mempengaruhi pemahaman terhadap pengambilan keputusan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan.

Populasi penelitian terdiri dari pimpinan, pengawas, dan pemeriksa sebagai pengguna informasi laporan posisi keuangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan secara convinion sampling dengan lingkup penelitian mengacu pada instansi pemerintahan di Jawa Tengah. Data diperoleh dari kuesioner yang disampaikan langsung oleh peneliti. Model persamaan regresi digunakan untuk menganalisis faktor pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial dalam menggunakan informasi laporan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi laporan posisi keuangan pada instansi pemerintah di Jawa Tengah.

Kata Kunci: Teori Sikap dan Perilaku, Laporan Posisi Keuangan, Instansi Pemerintah, Pendidikan, Pengalaman, dan Faktor Sosial, Pengambilan Keputusan

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah *robbil 'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan berkahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “MANFAAT LAPORAN POSISI KEUANGAN BAGI PIMPINAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan di Jawa Tengah)” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan berupa dukungan, bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Moch. Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan selaku dosen pengampu Teori Akuntansi dan Seminar Akuntansi yang selalu memberi motivasi agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si, Ph.D, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Adityawarman S.E., M.Acc., Akt. selaku dosen wali atas pengarahan yang telah diberikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini.
6. Seluruh staff dan karyawan bagian Tata Usaha yang telah banyak membantu dalam berbagai proses yang diperlukan.
7. Kedua orang tua tercinta Ayah Drs. H. Syaefullah dan Mama Dra. Hj. Umyati yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis.
8. Kedua adik tersayang Ijal dan Rizky yang selalu memberikan dukungan kepada teteh, mari kita membanggakan kedua orang tua kita.
9. Winda Rosiana Pratiwi, sahabat yang selalu ada dalam kondisi apapun, dari awal perkuliahan hingga kelulusan, semoga sampai seterusnya.
10. Sahabat Gayamsari House, Celi, Depi, Pebi, Andin, sahabat penulis yang selalu memberi keceriaan setiap harinya.
11. Sahabat KKN “The Big Cotton River Village” Puput, Cimer, Depri, Pani, dan Ari atas persahabatan dan pengalaman yang sangat berkesan.
12. Sahabat penulis sejak SMP Resty Dwi Utami yang selalu menjaga persahabatan hingga saat ini.
13. Sahabat-sahabat akuntansi yang telah meluangkan waktunya disaat ujian kelulusan, Wate, Depi, Vita, Norma, Raras, Nurani, Cipe, Ica anaiza, Bocil, Enny, Zia, Tasya, Syoraya, Tommy, Bahana, Dhika, Dinar, Epan, dan Fartomy.

14. Tim SD Lovers, Winda, Alfita, Tarina, atas kerja samanya, semoga ada karya kita bersama dikemudian hari.
15. Seluruh teman-teman Akuntansi 2010 Reguler 1 yang selalu mewarnai setiap hariku selama di Semarang.
16. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
17. Seluruh kenangan di Kota Semarang, yang memberikan makna kehidupan, makna merindu, makna bersyukur, makna pertemuan, serta makna perpisahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 3 Maret 2014

Penulis,

(Fitri Risalawati)

NIM. 12030110120094

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Sikap dan Perilaku	12
2.1.2 Perencanaan, Pengendalian, dan Pengelolaan	13
2.1.3 Informasi Relevan	14
2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.1.5 Laporan Posisi Keuangan	18
2.1.6 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan	21
2.1.7 Pendidikan	22
2.1.8 Pengalaman	23
2.1.9 Faktor Sosial	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1 Pendidikan	32
2.4.2 Pengalaman	33
2.4.3 Faktor Sosiial	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
3.1.1 Variabel Terikat	36
3.1.2 Variabel Bebas	37
3.2 Populasi dan Sampel	40

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5 Uji Kualitas Data.....	43
3.5.1 Uji Reliabilitas Data.....	43
3.5.2 Uji Validitas Data.....	44
3.6 Deskripsi Variabel Penelitian.....	44
3.7 Uji Statistik Regresi.....	45
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.7.1.1 Uji Multikolonieritas.....	46
3.7.1.2 Uji Normalitas.....	46
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.7.2 Uji Model.....	47
3.7.2.1 Uji Statistik Simultan (Uji Statistik F).....	47
3.7.2.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.7.3 Uji Hipotesis.....	47
3.5.4.3 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t).....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Tingkat Partisipasi Objek Penelitian.....	49
4.2 Deskripsi Objek Penelitian.....	50
4.3 Uji Kualitas Data.....	52
4.3.1 Uji Reliabilitas Data.....	53
4.3.2 Uji Validitas Data.....	53
4.4 Deskripsi Variabel Penelitian.....	56
4.5 Uji Statistik Regresi.....	57
4.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.5.1.1 Uji Multikolonieritas.....	58
4.5.1.2 Uji Normalitas.....	59
4.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	62
4.5.2 Uji Model.....	64
4.5.3 Uji Hipotesis.....	66
4.6 Interpretasi Hasil.....	68
4.6.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Penggunaan Informasi LPK.....	68
4.6.2 Pengaruh Pengalaman terhadap Penggunaan Informasi LPK.....	70
4.6.3 Pengaruh Faktor Sosial terhadap Penggunaan Informasi LPK.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Jumlah Populasi.....	41
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner Dan Tanggapan Yang Digunakan..	50
Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden	51
Tabel 4.3 Reliabilitas Variabel Penelitian	53
Tabel 4.4 Analisis Intrumen Validitas LPK	54
Tabel 4.5 Analisis Intrumen Validitas Faktor Sosial	55
Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Penelitian	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas.....	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser.....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Model	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis	67
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	60
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner	83
Lampiran B Frekuensi	89
Lampiran C Uji Kualitas Data	94
Lampiran D Deskriptif Statistik	96
Lampiran E Uji Asumsi Klasik	97
Lampiran F Uji Model	101
Lampiran G Uji Hipotesis	102
Lampiran H Tabel t dan r	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan diperuntukkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai keadaan keuangan. Keadaan keuangan dapat digambarkan melalui Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam standar pelaporan keuangan yang baru yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dilakukan perubahan komponen laporan keuangan diantaranya Neraca diubah menjadi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi diubah menjadi Laporan Laba Rugi Komprehensif, dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak mengalami perubahan.

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat sedemikian rupa agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi (Indra, 2005).

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan (*general porpuse*) untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun,

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Mengacu pernyataan Ang (1997), *stakeholders* perlu informasi dari analisis fundamental dan analisis teknis. Selain itu, *stakeholders* perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan peristiwa global lainnya. Analisis fundamental berkaitan langsung dengan kondisi instansi pemerintah. Kondisi ini nampak dari informasi yang ada pada laporan keuangan. Analisis kondisi instansi pemerintah dapat melalui penelaahan berbagai data yang menyangkut tentang penerimaan, belanja, struktur aset dan ekuitas, perbandingan anggaran dengan realisasinya, rasio-rasio keuangan, seperti: *current ratio*, rasio belanja pelayanan, rasio-rasio lainnya.

Sebagaimana salah satu fungsi laporan keuangan, yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian maka sejauhmana *stakeholders* memanfaatkan informasi keuangan. Menurut Leblibici dan Salancik (1981), penggunaan informasi dapat mengurangi ketidakpastian. Masalahnya, *stakeholders* menghadapi banyak informasi yang harus dipilih untuk digunakan sebagai dasar keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian.

Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan pemerintah daerah, maka pengguna dalam lingkungan pemerintah daerah harus memahami laporan keuangan dengan baik sehingga mampu memanfaatkannya secara optimal. Pada instansi pemerintah laporan keuangan berfungsi sebagai (a) pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam mencapai tujuan, (b) sarana mengkomunikasikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, (c) evaluasi pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas instansi pemerintah untuk kepentingan para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka pimpinan instansi selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan instansi pemerintah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan laporan keuangan bermanfaat bagi pimpinan instansi pemerintah dalam perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan instansi pemerintah, sehingga laporan keuangan instansi pemerintah mengandung unsur relevan, keandalan, kelengkapan, materialitas, pertimbangan sehat, dapat dibandingkan, substansi mengungguli bentuk (*substance over form*), dapat

dipahami, dan pertimbangan biaya dan manfaat. Hal tersebut yang membuat laporan keuangan instansi pemerintah memiliki karakteristik kualitatif.

Laporan keuangan pemerintah dijadikan sebagai tolak ukur kinerja sistem pemerintahan selama periode yang berlangsung, disamping itu pemerintah bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang disajikan tersebut untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan mengenai pendistribusian anggaran ke berbagai instansi pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. CaLK meliputi penjelasan suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca, penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah, salah satunya perlu pembuatan laporan posisi keuangan sebagai komponen penting

laporan keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Kewajiban terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Menurut PMK Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Penggunaan informasi analisis fundamental telah dikaji oleh banyak peneliti. Hasil penelitian Foster (1986), laporan keuangan merupakan sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian lain bahwa arus kas, laba, pengumuman deviden, dan rasio keuangan mendapat reaksi dari investor (Clinch *et al.*, 2000; Bhattacharya *et al.*, 2003; Baker & Powell, 1999; Ou & Penman, 1989). Penelitian di Indonesia yang hasilnya sama telah dilakukan oleh Anggono (2002), Sutopo (2002), Triyono (2000), Triyono dan Hartono (2000), dan Febrianto (2005). Penelitian yang memberi hasil berbeda dilakukan oleh Kurniawan (2000), yaitu tidak ada hubungan antara arus kas operasi dan laba dengan reaksi investor. Temuan Sudarno dkk. (2008) bahwa pengalaman berperan dalam menilai dan membobot serta memilih informasi yang relevan dengan keputusan yang akan dibuatnya. Sedang temuan Williams dan Seaman (2001) bahwa budaya berdampak pada desain sistem informasi akuntansi, dimana desain ini ,menunjukkan jenis informasi yang dihasilkan.

Semua penelitian di atas melakukan kajian pada perusahaan yang berorientasi profit. Penelitian ini melakukan studi empiris pada organisasi yang berorientasi pelayanan (instansi pemerintah) dimana pola pikirnya berdasarkan pada studi yang dilakukan Sudarno dkk. (2008).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyadi (2009). Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan, masa kerja, dan pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. Penelitian Cahyadi didukung oleh Sudarno (2008) bahwa investor yang berpengalaman selalu memperhatikan isu-isu global sebagai dasar keputusan investasinya. Sudarno (2013) juga mendukung bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Keuangan (LPK), serta Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan penelitian Sudarno (2013) pada sektor pemerintah berbeda dengan hasil penelitian pada sektor swasta (2008) bahwa pengalaman dan kebiasaan (budaya) tidak berhubungan dengan laporan keuangan LRA, LPK, LAK, dan CALK.

Sedangkan penelitian Martiningsih (2008) membuktikan bahwa yang mempengaruhi pengambilan keputusan laporan keuangan pemerintah yaitu informasi kondisi keuangan, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran, dan informasi naratif. Untuk informasi kondisi ekonomi tidak diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam penelitian Fontanella (2010) dibuktikan bahwa latar belakang pendidikan para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah, disamping itu

pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi laporan keuangan masih terbatas. Selain itu, penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah seringkali dilakukan secara menyeluruh, bukan secara individual pemanfaatan laporan keuangan. Penggunaan dan pemilihan informasi oleh pengguna pada neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara khusus pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial terhadap pemanfaatan laporan posisi keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*) khususnya para pimpinan, pengawas dan pemeriksa pada instansi pemerintahan memerlukan laporan keuangan untuk memperoleh informasi dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan atas keuangan daerah. Jenis informasi yang ada di instansi pemerintah berupa informasi analisis fundamental (laporan keuangan). Mengacu pada UU No. 1 tahun 2004 dan PMK No. 233 tahun 2011, laporan keuangan yang disusun oleh pimpinan instansi LRA, Neraca, dan CaLK.

Salah satu komponen laporan keuangan yang penting dalam pengambilan keputusan yaitu neraca yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pengguna laporan keuangan harus memahami betul informasi yang terkandung di neraca dalam laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Permasalahan penelitian adalah pengaruh faktor pendidikan, pengalaman dan faktor sosial dalam penggunaan informasi laporan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Dari masalah diatas, maka timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pimpinan dalam pemilihan jenis informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).
2. Apakah pengalaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pimpinan dalam pemilihan jenis informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).
3. Apakah faktor sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pimpinan dalam pemilihan jenis informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan informasi laporan posisi keuangan oleh pimpinan, pengawas, dan pemeriksa di instansi pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Pemahaman atas informasi laporan posisi keuangan sangat penting untuk membuat suatu keputusan, sehingga pengguna laporan keuangan harus memiliki kemampuan yang memadai. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji, mengesahkan, dan menerangkan hal-hal berikut:

1. Memberikan bukti faktor pendidikan sebagai variabel yang berdampak pada pemilihan jenis informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).
2. Memberikan bukti faktor pengalaman sebagai variabel yang berdampak pada pemilihan jenis informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).
3. Memberikan bukti faktor sosial sebagai variabel yang berdampak pada pemilihan jenis informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Laporan keuangan menyediakan informasi atas pengelolaan sumber daya kepada berbagai pihak yang bekepentingan, namun pada kondisi tertentu laporan keuangan dapat mengalami penurunan nilai relevansinya. Menurut Lev dan Zarowin (1999) dan Brown et al. (1999), bahwa *value relevance* informasi akuntansi telah mengalami penurunan. Lebih tegas, Francis dan Schipper (1999) menyatakan bahwa informasi akuntansi telah kehilangan sebagian relevansinya bagi *stakeholders*. Artinya pengguna tidak bisa bersandar pada informasi dalam laporan keuangan dalam membuat keputusannya. Hal ini dibuktikan oleh Margani (2004) dan Sekar (2004).

Berdasarkan realitas di atas maka penelitian ini fokus pada tidak semua informasi yang ada neraca digunakan oleh pengguna dan faktor pendidikan, pengalaman dan faktor sosial diprediksi mempengaruhi penggunaan jenis-jenis informasi. Untuk itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan kepada pengambil keputusan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah literature akuntansi mengenai faktor yang mempengaruhi pemanfaatan informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK) yang tersedia dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca bahwa dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian dibutuhkan kualitas individu yang baik dalam memilih dan memanfaatkan informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK).
3. Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan, bahwa kualitas pengguna berupa pendidikan, pengalaman dan faktor sosial memberi pengaruh terhadap pemanfaatan informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK) yang dibutuhkan.
4. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambil keputusan ketika memilih dan memanfaatkan berbagai jenis informasi yang tersedia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan akan diorganisasikan dalam lima bab, antara lain :

- **BAB I PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Berisi landasan teori yang berisi teori sikap dan perilaku, teori pendekatan kontingensi, Perencanaan, Pengendalian, dan Pengelolaan, Informasi Relevan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan, Pendidikan, Pengalaman, dan Kebiasaan (Budaya) serta Penelitian terdahulu dan Tabel Penelitian Terdahulu. Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang diajukan yaitu Pendidikan, Pengalaman, serta Kebiasaan (budaya).

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab III berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Sehingga dalam bab III akan diuraikan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti dan definisi operasional dari variabel tersebut dalam penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data kuantitatif dan interpretasi hasil serta argumentasi terhadap hasil penelitian.

- **BAB V PENUTUP**

Merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sikap dan Perilaku

Teori sikap dan perilaku (*theory of attitude and behavior*) dikembangkan oleh Triandis (1980). Menurut Triandis (1980) bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi yang ada. Sikap adalah berkenaan dengan apa yang orang-orang ingin lakukan. Aturan sosial merupakan apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Kebiasaan adalah berkaitan dengan apa yang mereka biasa lakukan. Konsekuensi merupakan akibat-akibat dari perilaku yang mereka pikirkan, baik konsekuensi yang menguntungkan maupun konsekuensi yang merugikan. Model perilaku interpersonal yang lebih komprehensif dari Triandis (1980) menjelaskan bahwa faktor sosial, perasaan, dan konsekuensi yang dirasakan dapat mempengaruhi tujuan perilaku dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku. Ini berarti perilaku tidak akan terjadi jika situasinya tidak memungkinkan.

Dalam penelitian ini, pengguna laporan posisi keuangan terbiasa (berperilaku) melaksanakan tugas secara sempurna jika arahan pimpinan berjalan dengan baik, mentalitas individu yang tangguh, dan kemampuan atau kompetensi yang unggul dari pengguna laporan posisi keuangan. Sebaliknya, jika arahan pimpinan tidak jelas, mentalitas individu yang tidak stabil, dan kemampuan atau kompetensi pengguna laporan keuangan tidak memadai maka budaya bekerja

pengguna laporan keuangan bersifat rutinitas. Akibatnya laporan keuangan yang berbasis kinerja tidak menunjukkan kualitas yang baik.

Penelitian ini menilai perilaku dari masing-masing individu pengguna laporan posisi keuangan berdasarkan tiga variabel, yaitu tingkat pendidikan menggambarkan kemampuan atau kompetensi yang unggul dari pengguna laporan posisi keuangan, pengalaman menggambarkan mentalitas individu yang tangguh berdasarkan lama bekerja, serta faktor sosial (perilaku) melaksanakan tugas secara sempurna yang diarahkan oleh pimpinan, dengan variabel independen tersebut peneliti dapat menilai sikap dari pimpinan, pengawas, dan pemeriksa dalam berperilaku terhadap pengambilan keputusan.

2.1.2 Perencanaan, Pengendalian, dan Pengelolaan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Fauziah 2011). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan

efektikitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Selanjutnya dalam PP Nomor 58 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3 Informasi Relevan

Maksud informasi relevan adalah informasi yang tersedia dan berpotensi digunakan untuk pengambilan keputusan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan oleh pimpinan, pengawas, dan pemeriksa. Menurut Belkaoui (1980), Informasi relevan mempunyai sifat (1) relevan dan untuk tujuan yang sama, (2) tepat, ringkas, dan reliabel, (3) konsiten, dapat diperbandingkan, dan seragam, (4) valid, objektif, netral, dan teridentifikasi, (5) kesatuan, (6) tepat waktu, (7) dapat berubah dan penyesuaian, (8) difahami, diterima, motivasi dan, layak. Menurut

Ang (1997), informasi relevan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu: informasi analisis fundamental dan informasi analisis teknikal.

Menurut Kawedar dkk (2008) Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu

- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Informasi yang relevan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengambilan keputusan. Menurut Mukhopadhyay dan Cooper (1992) penyediaan informasi relevan akan menghasilkan keputusan yang tepat dan benar. Hasil penelitian Savich (1997) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berhubungan secara positif dengan penggunaan informasi.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian Setiawan (2012), berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan (UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan SKPD yang telah disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui

PPKD paling lambat dua bulan setelah akhir tahun anggaran/periode akuntansi berakhir.

Laporan Keuangan SKPD terdiri atas tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk menjamin tercapainya akuntabilitas, laporan keuangan SKPD yang disampaikan dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD. Surat pernyataan kepala SKPD berisi pernyataan bahwa laporan keuangan SKPD menjadi tanggung jawabnya dan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD (Haryanto dkk, 2007). LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Haryanto dkk, 2007).

Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut SPAP 01, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud pimpinan entitas adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada sebagian entitas akuntansi dan gubernur/bupati/walikota. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.”

2.1.5 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut (Kawedar dkk, 2008):

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat

ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut: (a) Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, (b) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, (c) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (d) pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan

2.1.7 Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 13 September 1974, pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia. Latar belakang pendidikan sebagai bagian dari kapasitas SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah (Fontanella, 2010). Di Indonesia, kesiapan SDM pemerintah menuju tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan masih menjadi dilema. Nazier (2009) menyatakan bahwa hasil penelitian BPK pada enam kementerian negara lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi menunjukkan negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang berlatarbelakang ilmu akuntansi. Hal senada juga diteliti oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004) pada Pemerintah Daerah XVZ yang menghasilkan bahwa pegawai berlatarbelakang ilmu akuntansi masih minim. Martiningsih (2008) juga menyimpulkan bahwa karakteristik responden, tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah.

2.1.8 Pengalaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung). Pengalaman juga dapat diartikan sebagai akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan dan penginderaan (Mathis, 2002). Mangkunegara (2000), menyatakan bahwa pengalaman seseorang akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dijumpai. Semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih baik. Sedangkan menurut sudut pandang psikologi, pengalaman diartikan sebagai sebuah pengetahuan atau ketrampilan terhadap suatu hal atau kejadian yang diperoleh melalui keterlibatan.

Sedangkan secara aplikatif Bonner (1990) mendefinisikan pengalaman pengguna laporan posisi keuangan sebagai wakil dari pengetahuan dan keahlian, sebab pengalaman memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam memecahkan masalah dan kompleksitas tugas. Pengalaman menumbuhkan kemampuan mengolah informasi, membuat perbandingan dari berbagai solusi sebagai alternatif dan pengambilan tindakan yang diperlukan (Gibbins, 1984). Ini berarti pengalaman *stakeholder* dalam pengambilan keputusan menentukan jenis-jenis informasi yang relevan untuk mengambil keputusan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan.

Menurut Robbin (1997) individu-individu dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberi tahu sesuatu maupun dengan mengalami secara langsung. Pandangan bahwa kita dapat belajar baik lewat pengamatan maupun pengalaman langsung disebut teori pembelajaran sosial.

2.1.9 Faktor Sosial

Faktor sosial adalah internalisasi individu yang berdasarkan informasi dari sekelompok masyarakat. Instrumen faktor sosial diadopsi dari pengukuran yang dikembangkan oleh Thompson *et al.*, (1991) dimana instrumen ini mencakup pernyataan tentang:

- a. Banyaknya rekan kerja yang menggunakan informasi khususnya dalam melaksanakan tugas/pekerjaan harian.
- b. Terdapatnya manajer senior/atasan yang membantu/ mendorong baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan informasi.
- c. Perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan dan penggunaan informasi.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa, faktor sosial adalah suatu kebiasaan yang muncul di dalam organisasi dan pola kebiasaan serta terkait dengan pengaruhnya pada pencapaian tujuan organisasi. Faktor sosial yang positif dan tumbuh menjadi kuat akan mampu memacu organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, faktor sosial yang negatif akan memberi dampak negatif bagi organisasi.

Pengguna laporan keuangan memiliki kecenderungan untuk melibatkan atasan atau bantuan organisasi dalam menentukan jenis informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga faktor sosial berpengaruh terhadap baik tidaknya jenis informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Zimmerman (2003) berpendapat bahwa para pimpinan adalah orang yang mempunyai hak untuk membuat keputusan sehubungan dengan penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan atau organisasi, yang kemudian harus mempertanggungjawabkan hasil keputusannya. Semua organisasi dibagi kedalam sub unit yang setiap pimpinannya diberi hak untuk mengambil keputusan dan kemudian dinilai berdasarkan sasaran kinerja tiap sub-unit tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti yang telah mengkaji penggunaan informasi keuangan, khususnya informasi dari laporan keuangan. Umumnya penelitian tersebut menggunakan data sekunder dan fokus di sektor privat/swasta. Sedang penelitian yang menggunakan data primer dan fokus di sektor publik/pemerintahan masih sangat terbatas. Berkenaan dengan kegunaan informasi keuangan, hasil studi Foster (1986) menunjukkan bahwa laporan keuangan sebagai sumber informasi utama *stakeholders* (investor) untuk pengambilan keputusan investasi. Temuan lainnya, *stakeholders* lebih memperhantikan laporan *earnings* daripada neraca. Di Indonesia, hasil penelitian Arie dan Mohammad (2006) bahwa *value relevance* laporan keuangan mengalami peningkatan untuk periode (2002-2003).

Penelitian yang berkenaan dengan manfaat informasi arus kas, penelitian Clinch et al. (2000) mendapatkan bahwa komponen arus kas operasi dan komponen akrual berhubungan dengan *return* saham. Di Indonesia, replikasi penelitian Clinch et al. (2000) dilakukan oleh Anggono (2002) yang mendapatkan bahwa komponen total arus kas dan komponen akrual bermanfaat untuk memprediksi laba abnormal di masa depan. Studi lain yang dilakukan oleh Triyono dan Hartono (2000) menunjukkan hasil yang berbeda-beda tergantung model yang digunakan. Berdasarkan model *level* didapatkan bahwa komponen arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi mempunyai hubungan harga saham, tetapi jika berdasarkan model *return* maka ketiga komponen arus kas tersebut tidak berhubungan dengan harga saham. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Sutopo (2002) bahwa hanya komponen arus kas pendanaan yang mempunyai manfaat bagi investor, sedang kedua komponen arus kas operasi dan arus kas investasi tidak signifikan. Penelitian Kurniawan (2000) mendukung hasil penelitian Sutopo (2002), yaitu hubungan antara komponen arus kas operasi dengan *return* saham tidak signifikan. Juga hasil studi Meythi (2006), yaitu tidak ada pengaruh komponen arus kas operasi terhadap harga saham dengan persistensi laba sebagai variabel *intervening*. Tetapi, hasil penelitian Sutopo (2002) bertentangan dengan hasil penelitian Sutopo (2001) sendiri, yaitu komponen arus kas operasi mempunyai hubungan dengan *return* saham.

Nilai keformatifan laba dibuktikan oleh Bhattacharya et al. (2003), hasilnya bahwa *stakeholders* lebih suka menggunakan laba pro forma dibandingkan dengan laba operasi. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh

Febrianto (2005) juga membuktikan bahwa laba kotor, laba usaha, laba bersih mempunyai hubungan dengan return saham. Selain itu, didapatkan bahwa laba kotor lebih informatif dibandingkan dengan laba usaha atau laba bersih. Hasil penelitian Ninna dan Suhairi (2006) bahwa arus kas investasi, laba kotor, dan size perusahaan berpengaruh terhadap *expected return* saham, sedangkan perubahan arus kas dari aktivitas operasi tidak berpengaruh. Manakala, penelitian Rahmat dan Erna (2005) membuktikan bahwa *stakeholders* (pasar) bereaksi sebelum dan sesudah pengumuman laba. Nilai keinformatifan deviden dan rasio keuangan telah dibuktikan oleh Baker dan Powell (1999). Hasil penelitian mereka adalah deviden dapat digunakan sebagai alat *signaling* bagi *stakeholders* (investor). Sedang penelitian Ou dan Penman (1989) untuk periode 1965 – 1972 memperoleh bukti empiris bahwa terdapat 16 dari 68 rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi return saham, tetapi untuk periode 1973 – 1977 didapatkan 18 rasio keuangan. Penelitian Dian dan Astuti (2005) di Indonesia menunjukkan rasio *Total Debt to Total Capital Assets*, *Total Assets Turnover*, dan *Return On Investment* yang dimanfaatkan oleh pemegang saham.

Penelitian yang menggunakan data primer dilakukan oleh Mursalim (2005) dan Sudarno dkk. (2008). Hasil Mursalim (2005), *calassificatory smoothing* memiliki pengaruh terhadap motivasi investor untuk berinvestasi, sedang *real smoothing* dan *artificial smoothing* tidak berpengaruh. Hasil penelitian Sudarno dkk. (2008) menunjukkan bahwa investor dalam pengambilan keputusannya berdasarkan informasi analisis fundamental dan informasi peristiwa global.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyadi (2009). Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan, masa kerja, dan pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. Penelitian Cahyadi didukung oleh Sudarno (2008) bahwa investor yang berpengalaman selalu memperhatikan isu-isu global sebagai dasar keputusan investasinya. Sudarno (2013) juga mendukung bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Keuangan (LPK), serta Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan penelitian Sudarno (2013) pada sektor pemerintah berbeda dengan hasil penelitian pada sektor swasta (2008) bahwa pengalaman dan kebiasaan (budaya) tidak berhubungan dengan laporan keuangan LRA, LPK, LAK, dan CALK.

Sedangkan penelitian Martiningsih (2008) membuktikan bahwa yang mempengaruhi pengambilan keputusan laporan keuangan pemerintah yaitu informasi kondisi keuangan, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran, dan informasi naratif. Untuk informasi kondisi ekonomi tidak diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam penelitian Fontanella (2010) dibuktikan bahwa latar belakang pendidikan para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah, disamping itu pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1

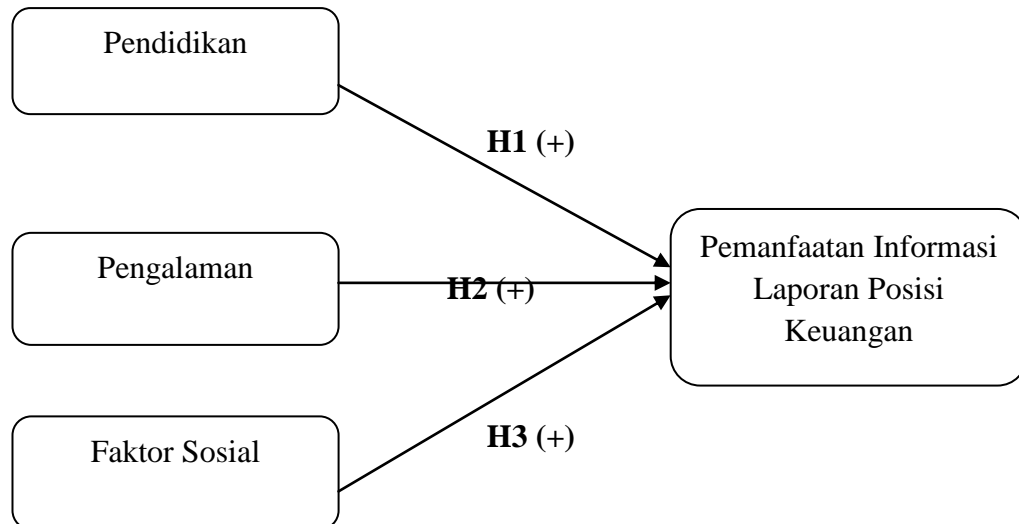
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dwi Cahyadi (2009)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Laporan Keuangan Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan • Masa Kerja • Pelatihan • Posisi di Pemerintahan 	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah • Masa kerja berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah • Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah • Posisi di pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah
2.	Amy Fotannella (2010)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang pendidikan pengguna • Pengetahuan akuntansi pengguna 	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pendidikan pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah • Pengetahuan akuntansi pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah
3.	Sudarno dkk. (2008)	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Dependen:	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik korelasi Pearson 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan informasi analisis fundamental dan informasi peristiwa global

		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan investasi <p>Mediating:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Regresi berganda 	<p>berkorelasi dengan keputusan investasi, sedang penggunaan informasi analisis teknikal dan informasi kondisi makro tidak berkorelasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan penting untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. Investor yang berpengalaman selalu memperhatikan isu-isu global sebagai dasar keputusan investasinya
4.	Martiningsih (2008)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan pemerintah <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi kondisi keuangan Informasi kondisi ekonomi Informasi kepatuhan terhadap aturan Informasi kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> One sample t-test Content analysis MANOVA 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi kondisi keuangan diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah Informasi kondisi ekonomi tidak diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah Informasi kepatuhan terhadap aturan diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah Informasi kinerja diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah Informasi perencanaan dan penganggaran diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah Informasi naratif diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah

5.	Sudarno (2013)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • LRA • LPK • LAK • CALK Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pengalaman • Budaya (Kebiasaan) 	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis laporan keuangan yang berisi informasi relevan adalah LRA, LPK, LAK, dan CALK • Tingkat pendidikan berhubungan dengan LRA, LPK, dan LAK • Pengalaman dan kebiasaan (budaya) tidak berhubungan dengan LRA, LPK, LAK, dan CALK • Informasi relevan yang bersifat tepat waktu sehingga digunakan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan, perencanaan, pengendalian adalah LRA dan LAK.
6.	Paulsson (2006)	Kualitatif	Penggunaan informasi akuntansi akrual di instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dalam sistem akuntansi akrual dimanfaatkan sesuai dengan lingkungan organisasi dan situasi keuangan yang dihadapi • Sistem akuntansi berbasis akrual kurang dimanfaatkan pemerintah dalam penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan.

2.3 Kerangka pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan proses menghimpun dan meningkatkan pengetahuan. Pendidikan diperoleh melalui pembelajaran secara terstruktur dalam perkuliahan. Pendidikan dalam bidang khusus akan meningkatkan pengetahuan pada bidang berkenaan. Pendidikan menumbuhkan kemampuan untuk menimbang dan memilih informasi. Selanjutnya membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Libby, 1995). Di Indonesia, tingkat pendidikan ditunjukkan dengan jenjang pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan menunjukkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki semakin tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka seseorang bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik, salah satunya dalam memanfaatkan

informasi laporan posisi keuangan. Karena itu, hubungan antara pendidikan dengan pemanfaatan informasi laporan posisi keuangan dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Pendidikan berpengaruh positif terhadap pemanfaatan informasi Laporan Posisi Keuangan.

2.4.2 Pengalaman

Pengalaman merupakan wakil dari pengetahuan dan keahlian sebab pengalaman memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam memecahkan masalah dan kompleksitas tugas (Isnaeni, 2008). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung). Pengalaman juga dapat diartikan sebagai akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan dan penginderaan (Mathis, 2002). Pengalaman akan memberi hasil menghimpun dan kemajuan bagi pengetahuan (Kanfer & Ackerman, 1989). Pengalaman diperoleh melalui praktek, khususnya praktek mengambil keputusan. Pengalaman menumbuhkan kemampuan untuk menimbang dan memilih informasi (Gibbins, 1984). Selanjutnya membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Libby, 1995). Menurut Bonner (1990) bahwa pengalaman mempengaruhi penyeleksian dan pembobotan nilai informasi yang ada.

Seseorang yang berpengalaman akan melakukan pekerjaan lebih baik daripada yang tidak memiliki pengalaman. Seseorang yang lebih berpengalaman

maka akan melakukan suatu tugas dengan lebih profesional, rinci, dan lengkap. Karena itu, hubungan antara pengalaman dengan pemanfaatan informasi laporan posisi keuangan dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Pengalaman berpengaruh positif terhadap pemanfaatan informasi Laporan Posisi Keuangan.

2.4.3 Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan internalisasi kultur subjektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain dalam situasi sosial tertentu (Triandis, 1980). Sedang menurut Woon (2004), faktor sosial sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok budaya subyektif dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus. Budaya subyektif berisi norma (*norm*), peran (*role*) dan nilai-nilai (*values*).

Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian Sudarno (2013) mengembangkan penelitian Thompson et al. (1991) mencakup pernyataan tentang :

- a. Banyaknya rekan kerja yang menggunakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.
- b. Terdapatnya manajer senior atau atasan yang membantu dan mendorong baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan laporan keuangan.

- c. Perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan dan penggunaan neraca dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian.

Terdapat dua pertanyaan lain mengenai faktor sosial yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu:

- a. Banyaknya rekan kerja yang mendorong untuk pemanfaatan dan menggunakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.
- b. Evaluasi kinerja hanya fokus pada data/informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.

Sehingga dapat disimpulkan antara faktor sosial dan pemanfaatan informasi laporan posisi keuangan dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3: Faktor Sosial berpengaruh positif terhadap pemanfaatan informasi Laporan posisi keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: (1) variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel dependen, dan (2) variabel independen (bebas), yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain.

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Laporan Posisi Keuangan (LPK). Pemanfaatan laporan posisi keuangan merupakan hal yang penting bagi pihak internal instansi pemerintahan. Melalui informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan diharapkan kinerja yang akan datang dapat lebih baik. Laporan posisi keuangan berisi harta kekayaan pada satu periode, laporan posisi keuangan juga berisi hutang dan modal. Dengan laporan posisi keuangan maka pihak-pihak yg berkepentingan dapat lebih mudah untuk mengetahui keadaan keuangan.

Pemanfaatan laporan posisi keuangan merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Pengukurannya menggunakan indikator yakni penggunaan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan laporan posisi keuangan diukur melalui kuesioner yang disusun oleh peneliti dan pembimbing, berisi 11 pertanyaan dengan 5 poin skala likert. Jawaban 1 berarti responden jarang menggunakan informasi tersebut dan jawaban 5 berarti responden sangat sering menggunakannya. Pilihan angka 3 atau nilai tengah tidak disediakan, hal ini mengacu pada budaya masyarakat Indonesia yang bersifat medioker, yaitu budaya yang cenderung memilih pilihan yang tidak ekstrim (nilai tengah).

3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Menurut Sekaran (2006), variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif. Apabila setiap unit kenaikan variabel bebas diikuti oleh kenaikan variabel terikat maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara positif. Demikian juga sebaliknya, apabila setiap unit penurunan variabel bebas diikuti oleh penurunan variabel terikat maka variabel bebas mempengaruhi secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial. Berikut ini penjelasan dari masing-masing variabel:

1. Pendidikan

Pendidikan pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan oleh responden. Variabel tingkat pendidikan diukur dengan skala ordinal sebagai berikut:

- a. Pendidikan Diploma (D1, D2, D3) : skor 1
- b. Pendidikan Sarjana (S1) : skor 2
- c. Pendidikan Pascasarjana (S2) : skor 4
- d. Pendidikan S3 : skor 5

Pilihan angka 3 atau nilai tengah tidak disediakan, hal ini mengacu pada budaya masyarakat Indonesia yang bersifat medioker. Tingkat pendidikan yang diukur dalam penelitian ini hanya dari tingkat Diploma hingga S3. Hal ini mengacu pada pendidikan karyawan inspektorat atau pemeriksa yaitu lebih banyak berlatar belakang pendidikan STAN (D3). Wakil rakyat biasanya merasa kurang percaya diri bahkan malu untuk mengakui bahwa pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan masa atau tempo seseorang melakukan tugasnya ditempat kerja (bagian) saat ini. Variabel pengalaman diukur dengan pertanyaan terbuka pada kuesioner, kemudian diukur berdasarkan lamanya bekerja dalam tahun. Jika jawaban responden menunjukkan bulan, maka jawaban dibulatkan menjadi tahun, dengan ketentuan jika diatas 6 bulan maka pembulatan menjadi 1 tahun, namun jika dibawah 6 bulan maka pembulatan menjadi 0.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan internalisasi individu berdasarkan informasi dari sekelompok masyarakat. Faktor sosial ditunjukkan dengan pengaruh dari orang lain atau organisasi terhadap seorang individu untuk menggunakan informasi laporan posisi keuangan. Variabel faktor sosial tidak dapat diukur secara langsung. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner berisi 5 pertanyaan dengan 5 poin skala likert yang menunjukkan seberapa besar orang lain atau organisasi memberikan dorongan dalam pemanfaatan laporan posisi keuangan. Jawaban 1 berarti penggunaan informasi oleh responden tidak dipengaruhi oleh sekelompok masyarakat, dan jawaban 5 berarti penggunaan informasi oleh responden sangat dipengaruhi oleh sekelompok masyarakat. Pilihan angka 3 atau nilai tengah tidak disediakan, hal ini mengacu pada budaya masyarakat Indonesia yang bersifat medioker. Indikator dalam variabel faktor sosial mengacu pada penelitian Sudarno (2013) mengembangkan penelitian Thompson *et al.* (1991) mencakup pernyataan tentang :

- a. Banyaknya rekan kerja yang menggunakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.
- b. Terdapatnya manajer senior atau atasan yang membantu dan mendorong baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan laporan keuangan.

- c. Perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan dan penggunaan neraca dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian.

Terdapat dua pertanyaan lain mengenai faktor sosial yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu:

- a. Banyaknya rekan kerja yang mendorong untuk pemanfaatan dan menggunakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.
- b. Evaluasi kinerja hanya fokus pada data/informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pimpinan instansi pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemeriksa di Jawa Tengah. Jumlah populasi kurang lebih 735 responden. Unit penelitian adalah individu, sedang subyek penelitian atau responden yang menjadi sumber data adalah bagian kepegawaian pada masing-masing SKPD, kantor DPRD, dan pemeriksa di Jawa Tengah. Menurut Zikmund (1994), pengumpulan data primer melalui komunikasi dengan individu, maka individu tersebut merupakan subyek yang mewakili populasi.

Tabel 3.1 berisi perhitungan jumlah populasi. Pimpinan selaku eksekutif kota dan kabupaten sebanyak 35 dengan masing-masing 9 dinas mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bupati serta Sekretaris Daerah. Pengawas selaku legislatif (DPRD) sebanyak 35 dengan masing-masing 6 orang yaitu 2 orang pimpinan dalam 3 partai politik yang menduduki urutan 3 teratas. Pemeriksa atau inspektorat kota dan kabupaten sebanyak 35 dengan masing-masing 6 orang selaku anggota tim review laporan keuangan SKPD.

Tabel 3.1
Jumlah Populasi

Wilayah	Jumlah	Estimasi Jumlah Responden	Total
Eksekutif Kota	6	9	54
Eksekutif Kabupaten	29	9	261
Legislatif (DPRD)	35	6	210
Yudikatif (pemeriksa)	35	6	210
Total Populasi			735

Besaran sampel yang tepat untuk penelitian adalah lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 (Roscoe, 1975). Rata-rata tingkat respon di Indonesia sebesar 10% sampai dengan 20% (Indriantoro dan Supomo, 1999), dengan jumlah populasi sebanyak 735 maka penelitian ini dilakukan secara sensus. Artinya, seluruh pimpinan instansi pemerintah, DPRD, dan pemeriksa di Jawa Tengah dikirim kuesioner penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data autentik yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner dengan indikator untuk setiap variabel dibagikan kepada setiap sampel. Sumber data penelitian adalah jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yang bekerja pada instansi pemerintahan di Jawa Tengah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner dikirimkan dengan dua cara, yaitu dikirim langsung dan dikirim melalui kurir. Kuesioner yang dikirim langsung, dikirimkan dengan cara mendatangi langsung alamat kantor instansi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, kemudian diserahkan kepada sub bagian tata usaha (bagian umum) dan didistribusikan oleh sub bagian tata usaha kepada responden yang dikehendaki. Kantor instansi yang berada di wilayah Semarang dan sekitarnya seperti kota Kendal, kabupaten Kendal, kota Demak, dan kabupaten Demak didatangi langsung, namun kota dan kabupaten lain dikirim menggunakan kurir. Pemberian kuesioner melalui sub bagian tata usaha pada instansi pemerintahan karena peneliti kesulitan mendapatkan data responden (pimpinan/pelaksana, pengawas, dan pemeriksa) sulit untuk ditemui secara langsung mengingat kegiatan responden yang cukup sibuk dan sangat menyita waktu.

Pengambilan kuesioner dipantau melalui telepon ke sub bagian tata usaha maupun kurir yang mengantarkan, waktu yang diberikan kurang lebih satu minggu setelah kuesioner di distribusikan, atau sesuai dengan kesepakatan dengan sub bagian tata usaha atau info yang berasal dari kurir.

Kuesioner yang didistribusikan kepada responden dengan menggunakan metode pemilihan sampel acak menggunakan *convenience* sampling, yaitu anggota populasi yang dengan senang hati bersedia berpartisipasi.

3.5 Uji Kualitas Data

Kualitas data mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini perlu untuk diuji keabsahan dan keandalan alat ukur. Hal ini karena benar tidaknya data tergantung dari instrumen yang digunakan. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel.

3.5.1 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas data dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Melalui uji reliabilitas dapat dilihat konsistensi alat dalam mengukur gejala yang sama. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Konsistensi jawaban sangat diperlukan karena pertanyaan-pertanyaan

dalam kuesioner adalah untuk mengukur sesuatu dalam setiap variabel. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai $\alpha > 0.60$ maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dikatakan reliabel.
- Jika nilai $\alpha < 0.60$ maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliabel.

3.5.2 Uji Validitas Data

Uji validitas data dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Validitas untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Validitas data konstruk studi ini diuji dengan menggunakan korelasi antara nilai setiap item instrumen variabel dengan nilai jumlah seluruh item instrumen. Kriteria suatu konstruk dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (nilai r hitung) lebih tinggi dari nilai r table untuk degree of freedom (df).

3.6 Deskripsi Variabel Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), untuk memberikan gambaran karakteristik suatu data yang akan dianalisis, maka dilakukan perhitungan rata-

rata (*mean*) dan standar deviasi. Rata-rata (*mean*) merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data yang didasarkan pada nilai rata-rata pada kelompok tersebut. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok atau jarak antara nilai-nilai setiap individu yang terdapat di kelompok tersebut. Pada penelitian ini, khususnya penggunaan informasi maka rata-rata menggambarkan sering tidaknya informasi tersebut digunakan. Di atas rata-rata menunjukkan informasi sering digunakan dan di bawah rata-rata menunjukkan informasi jarang digunakan.

3.7 Uji Statistik Regresi

Hasil analisis regresi berganda adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Tabachnick,1996).

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji normalitas data, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini sebab data yang dikumpulkan melalui kuesioner hanya meneliti satu periode, sehingga

tidak memerlukan penelitian yang berurutan sepanjang waktu. Berikut dijelaskan masing-masing dari uji asumsi tersebut.

3.7.1.1 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan yang sempurna atau sangat kuat antara variabel independen. Regresi yang baik apabila tidak ada hubungan yang sempurna atau sangat kuat antara variabel independen. Indikasi tidak ada hubungan yang sempurna atau sangat kuat antara variabel independen apabila nilai *tolerance* di atas 0,10 atau nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah 10 (Ghozali, 2011).

3.7.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Regresi yang baik jika data penelitian berdistribusi normal. Indikasi data berdistribusi normal apabila gambar (*histogram*) data penelitian mengikuti garis diagonal, di mana garis diagonal tersebut merupakan bentuk dari distribusi normal (Ghozali, 2011).

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui penyebaran data dari variabel. Terjadi heteroskedastisitas jika varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah berbeda. Regresi yang baik apabila data penelitian

tidak terdapat heteroskedastisitas. Indikasi data tidak terdapat heteroskedastisitas apabila gambar *scatterplot* menunjukkan penyebaran data berada di atas atau di bawah nilai kosong pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas atau tidak membentuk pola tertentu, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit (Ghozali, 2011).

3.7.2 Uji Model

3.7.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011)

3.7.2.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2011).

3.7.3 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis menggunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Hair et al., 1998). Regresi yang baik telah memenuhi

uji asumsi klasik, yaitu data memiliki distribusi normal dan data tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Gujarati, 2003). Oleh karena itu, data akan diuji multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas, sebelum dilakukan analisis regresi.

Data yang berhasil dikumpulkan akan diuji tingkat kerepresentativannya, adanya data ekstrem, kevalidan, dan reliabilitas data. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif ke atas variabel-variabel penelitian dan uji terdapatnya hubungan di antara variabel yang telah dihipotesiskan. Pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi berikut.

$$Y = b + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana: X_1 = Pendidikan

X_2 = Pengalaman

X_3 = Faktor Sosial

Y = Pemanfaatan informasi Laporan Posisi Keuangan

3.7.3.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apa bila t bernilai positif maka kesimpulan hipotesis diterima, dan apabila t bernilai negatif maka hipotesis ditolak.